

LITERASI POLITIK GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK DIGITAL

Anton Sulaiman^{1✉}, Rifqi Fauzi²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}

antonsulaiman@bungabangsacirebon.ac.id¹, rief.elfauzi01@gmail.com²

Received: 2024-04-26; Accepted: 2024-06-06; Published: 2024- 06 -20

Abstrak: Penelitian ini menganalisis literasi politik Generasi Z Indonesia dalam perspektif komunikasi politik digital dengan menggunakan Teori Masyarakat Jaringan Manuel Castells sebagai kerangka analisis utama. Generasi Z yang menyumbang 27,94 persen dari populasi Indonesia dan mencakup 22,85 persen Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2024 merepresentasikan kekuatan elektoral signifikan dengan potensi mengubah lanskap politik nasional. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan sumber data primer dari buku teks ilmiah, artikel jurnal peer-reviewed, dan dokumen resmi yang dipublikasikan dalam kurun 2020-2024, dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi politik Generasi Z terbentuk melalui tiga dimensi kunci masyarakat jaringan: space of flows yang memungkinkan informasi politik bersirkulasi bebas melintasi batas geografis melalui platform digital, timeless time yang memfasilitasi partisipasi politik real-time tanpa hambatan temporal, dan mass self-communication yang mendemokratisasikan kapasitas komunikasi sehingga setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi politik tanpa mediasi institusi tradisional. Namun, di balik potensi transformatif ini terdapat tantangan struktural berupa information overload yang mempersulit kurasi informasi kredibel, algoritma media sosial yang menciptakan echo chamber dan polarisasi politik, serta proliferasi disinformasi yang menyebar lebih cepat dari klarifikasi faktual. Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan literasi politik Generasi Z memerlukan pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan literasi kognitif untuk analisis kritis, literasi teknis untuk verifikasi fakta, dan literasi etis untuk komunikasi politik bertanggung jawab, serta strategi menjembatani kesenjangan antara aktivisme digital dengan partisipasi politik konvensional agar potensi demografis dan digital Generasi Z dapat dioptimalkan untuk penguatan kualitas demokrasi partisipatif Indonesia di era digital.

Copyright © 2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

Pendahuluan

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade belakangan ini telah memberikan dampak transformatif terhadap dinamika komunikasi politik di Indonesia. Kemunculan berbagai platform digital dan jejaring sosial menciptakan arena politik kontemporer yang membuka peluang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam wacana politik nasional. Di tengah perubahan ekosistem politik ini, kelompok demografis yang dikenal sebagai Generasi Z—mereka yang lahir dalam rentang waktu 1997 sampai 2012—hadir sebagai kekuatan politik yang memiliki potensi mengubah lanskap politik Indonesia. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa Generasi Z berkontribusi sebesar 27,94 persen dari keseluruhan populasi Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa, menempatkan mereka sebagai segmen terbesar dalam piramida demografi bangsa. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mencatat dalam persiapan Pemilihan Umum 2024 bahwa proporsi Generasi Z mencapai 22,85 persen dari keseluruhan Daftar Pemilih Tetap, berada di urutan kedua setelah kelompok Milenial. Data empiris ini mengindikasikan bahwa Generasi Z telah melampaui peran konvensional sebagai pemilih pemula dan berkembang menjadi konstituensi elektoral dengan kemampuan menentukan trajektori politik Indonesia pada masa mendatang.

Terdapat sejumlah ciri khas yang menjadikan Generasi Z berbeda secara mendasar dibandingkan dengan kelompok generasi yang mendahului mereka. Sebagai digital natives, mereka merupakan kohort pertama yang mengalami proses tumbuh kembang dengan ketergantungan total pada ekosistem teknologi digital sejak usia dini. Kapabilitas literasi digital yang superior pada Generasi Z membuka akses tanpa batas terhadap ragam informasi politik melalui ekosistem media sosial yang beragam, mulai dari Instagram, Twitter (kini berganti nama menjadi X), TikTok, hingga YouTube. Heryanto (2024) dalam karyanya "Membaca Lanskap Pemilu 2024: Perspektif Literasi Politik" menekankan bahwa "literasi politik bukan semata tentang pengetahuan, melainkan juga tentang keterampilan dalam mengakses, membandingkan, dan mengkomunikasikan informasi politik kepada orang lain, serta sikap politik warga negara yang lebih otonom dan berlandaskan keajekan nalar". Kompetensi Generasi Z dalam bernavigasi di ruang siber menghasilkan paradigma baru dalam konstruksi opini politik, pengorganisasian massa, serta keterlibatan elektoral yang melampaui konvensi-konvensi tradisional dalam berpolitik. Tidak seperti generasi terdahulu yang cenderung berposisi sebagai penerima informasi politik secara pasif dari media massa konvensional, Generasi Z menunjukkan keaktifan dalam mencipta, menyebarkan, dan mengonsumsi materi politik secara bersamaan dalam lingkungan digital.

Perkembangan pesat komunikasi politik berbasis digital ini memiliki korelasi erat dengan transformasi struktural masyarakat Indonesia menuju konsepsi yang oleh Manuel Castells disebut sebagai *network society* atau masyarakat jaringan. Menurut Ohoiwutun (2020), Castells mendefinisikan masyarakat jaringan sebagai "struktur sosial berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dijalankan oleh jaringan

yang bersumber pada jaringan komputer digital dan mikroelektronik". Dalam kerangka analisis literasi politik Generasi Z, konsepsi masyarakat jaringan ini memiliki relevansi signifikan karena menjelaskan bagaimana teknologi digital telah mengkreasi ruang politik alternatif yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis maupun temporal. Generasi Z mengonstruksi literasi politik mereka melalui apa yang Castells sebut sebagai *space of flows* atau ruang aliran—sebuah dimensi di mana informasi politik bersirkulasi secara bebas melintasi batas-batas teritorial melalui infrastruktur jaringan digital. Mereka juga mengalami fenomena *timeless time* atau waktu tanpa waktu, kondisi di mana aktivitas politik berlangsung secara simultan dan dalam waktu nyata tanpa terpengaruh oleh perbedaan zona waktu geografis. Lebih substansial lagi, fenomena *mass self-communication* atau komunikasi massa-diri memfasilitasi setiap individu dari Generasi Z untuk berperan ganda sebagai produsen sekaligus konsumen informasi politik, menciptakan demokratisasi akses ke arena publik politik yang sebelumnya dimonopoli oleh elite politik dan institusi media massa tradisional.

Meski demikian, di samping potensi signifikan yang dimiliki Generasi Z dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia melalui partisipasi politik digital, terdapat berbagai tantangan dan paradoks yang memerlukan kajian kritis mendalam. Heryanto et al. (2024) dalam publikasi "Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia" mengidentifikasi bahwa "kompleksitas ruang digital juga membawa risiko penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat mengancam kualitas literasi politik masyarakat". Generasi Z yang berkembang dalam era *information overload* atau banjir informasi menghadapi dilema kompleks dalam melakukan kurasi dan seleksi terhadap informasi politik yang dapat dipercaya di tengah produksi masif konten digital yang terjadi setiap detik. Heryanto (2019) dalam bukunya "Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi" menyoroti "berbagai faktor yang mempengaruhi literasi politik, termasuk pendidikan, media, dan partisipasi politik masyarakat, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan literasi politik di Indonesia". Konteks ini menjadi semakin kritis ketika mempertimbangkan fakta bahwa Generasi Z, meskipun memiliki aksesibilitas digital yang ekstensif, tidak secara otomatis memiliki kapasitas literasi kritis yang memadai untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap informasi politik secara objektif dan berimbang.

Urgensi kajian tentang literasi politik Generasi Z dalam perspektif komunikasi politik digital semakin tinggi mengingat masih terbatasnya penelitian komprehensif yang mengintegrasikan kerangka teoretis masyarakat jaringan dengan realitas empiris perilaku politik digital Generasi Z di Indonesia. Rosit et al. (2024) dalam karya kolaboratif "Komunikasi Politik Digital" mengemukakan bahwa berbagai dimensi komunikasi politik digital—mencakup demokrasi siber di Indonesia beserta tantangannya, pengaruh media sosial terhadap pemilu, hingga perspektif global—memerlukan analisis mendalam yang mampu menjelaskan bagaimana dinamika *communication power* atau kekuatan komunikasi mempengaruhi kemampuan

Generasi Z dalam mengakses, memproses, dan mendistribusikan informasi politik di media digital. Pemahaman tentang mekanisme Generasi Z dalam membentuk identitas politik dan partisipasi dalam gerakan sosial melalui jaringan komunikasi politik digital yang melampaui batasan geografis dan temporal konvensional menjadi kunci esensial untuk merancang strategi penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi lacuna akademis tersebut dengan menganalisis secara sistematis dan komprehensif mekanisme pembentukan, perkembangan, dan operasionalisasi literasi politik Generasi Z dalam ekosistem komunikasi politik digital yang terjaringan, dengan memanfaatkan Teori Masyarakat Jaringan Manuel Castells sebagai kerangka analisis primer. Melalui pendekatan studi pustaka yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan literasi politik Generasi Z serta penguatan kualitas demokrasi Indonesia di era digital.

Metodologi Penelitian

Riset ini menerapkan metode kualitatif dengan karakter deskriptif serta menggunakan rancangan studi kepustakaan (*library research*) sebagai strategi penyelidikan ilmiah. Abdussamad (2021) menegaskan bahwa "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci", yang berarti peneliti memiliki peran sentral dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Dalam konteks kajian ini, studi kepustakaan dijalankan melalui serangkaian aktivitas sistematis yang mencakup pengumpulan, pembacaan kritis, pencatatan, serta pengolahan berbagai literatur akademis yang relevan dengan tema penelitian tanpa melibatkan observasi lapangan secara langsung. Adlini et al. (2022) mengemukakan bahwa "metode penelitian kualitatif studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian". Rancangan riset ini memiliki orientasi eksploratif-interpretatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan menafsirkan fenomena literasi politik pada kalangan Generasi Z melalui kacamata komunikasi politik digital dengan basis telaah literatur yang komprehensif. Penerapan pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena kesesuaiannya dengan maksud penelitian yang berupaya menyajikan deskripsi menyeluruh dan analisis konseptual-teoretis mengenai literasi politik Generasi Z berdasarkan tinjauan pustaka yang terpercaya dan terkini.

Penelitian ini memanfaatkan dua klasifikasi sumber data: primer dan sekunder, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung analisis. Kategori data primer terdiri dari buku-buku teks ilmiah, artikel-artikel dalam jurnal akademis berskala nasional dan internasional yang telah melalui *peer review*, serta dokumen resmi yang mengulas topik literasi politik, ciri khas Generasi Z, dinamika komunikasi politik di era digital, dan Teori Masyarakat Jaringan (*Network Society Theory*) yang dirumuskan oleh Manuel Castells, dengan pembatasan temporal publikasi pada kurun lima tahun terakhir (2020-2024). Penentuan karakteristik literatur primer dilandaskan

pada empat parameter fundamental: pertama, keterkaitan substansial dengan fokus kajian; kedua, otoritas akademis pengarang dan kredibilitas institusi penerbit; ketiga, kemutakhiran tahun penerbitan; dan keempat, mutu kandungan yang memenuhi standar rigor metodologis. Saat dan Mania (2020) menjelaskan bahwa "purposive sampling merupakan pemilihan sumber pustaka yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian", yang dalam penelitian ini diterapkan untuk menentukan literatur yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sedangkan kategori data sekunder meliputi konten artikel jurnalistik daring, dokumentasi hasil penelitian sebelumnya, naskah presentasi seminar, prosiding dari konferensi akademis, dan aneka referensi pelengkap lainnya yang berperan sebagai penguat dan penambah kedalaman data primer dalam membangun argumentasi serta analisis penelitian yang lebih kokoh.

Aktivitas pengumpulan data diselenggarakan melalui teknik dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan informasi dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Adlini et al. (2022) menyatakan bahwa studi pustaka mencakup "serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian", yang menunjukkan sifat sistematis dari proses ini. Guna menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber sebagai mekanisme pengujian keabsahan, yakni melakukan konfirmasi silang terhadap data yang telah terkumpul melalui perbandingan dari beragam sumber pustaka yang berbeda untuk memastikan tingkat kepercayaan dan kebenaran informasi. Arianto (2024) mengemukakan bahwa "triangulasi merupakan metoda untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan menggabungkan berbagai sumber, data, teori, metode, waktu, investigator maupun multiple", yang menekankan pentingnya multiperspektif dalam validasi data. Selanjutnya, proses analisis data dalam kajian ini menggunakan model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yang tersusun atas tiga elemen utama yang saling terkait. Elemen pertama adalah reduksi data (data reduction), yang menurut Abdussamad (2021) merupakan "kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting", sehingga data yang berlimpah dapat disederhanakan menjadi informasi yang lebih terkelola; elemen kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses pengaturan informasi secara terstruktur yang memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan; dan elemen ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification), yang dilakukan berdasarkan data yang telah mengalami proses reduksi dan telah disajikan secara sistematis. Ketiga elemen analisis ini dijalankan secara berulang, interaktif, dan kontinu selama keseluruhan proses penelitian sampai mencapai titik jenuh data (data saturation) dan menghasilkan inferensi yang memiliki akuntabilitas akademis tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat kredibilitas yang memadai.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Literasi Politik Digital Generasi Z dalam Ekosistem Masyarakat Jaringan

Analisis mendalam terhadap literasi politik Generasi Z dalam konteks komunikasi politik digital mengungkapkan transformasi fundamental dalam cara kelompok demografis ini membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan pemahaman politik mereka. Berbeda dengan generasi-generasi pendahulu yang memperoleh pengetahuan politik melalui jalur-jalur konvensional seperti pendidikan formal, media massa tradisional, atau sosialisasi politik dalam keluarga, Generasi Z mengembangkan literasi politik mereka melalui ekosistem digital yang kompleks dan dinamis. Heryanto (2024) menegaskan bahwa "literasi politik bukan semata tentang pengetahuan, melainkan juga tentang keterampilan dalam mengakses, mengkomparasikan, dan mengomunikasikan informasi politik kepada orang lain, serta sikap politik warga negara yang lebih otonom dan berlandaskan keajekan nalar". Dalam konteks Generasi Z, keterampilan ini tidak hanya mencakup kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kompetensi dalam memproduksi dan mendistribusikan konten politik melalui berbagai platform digital, menciptakan pola literasi yang bersifat partisipatif dan interaktif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses konstruksi literasi politik Generasi Z berlangsung dalam ruang yang oleh Castells disebut sebagai *space of flows* atau ruang aliran. Ohoiwutun (2020) menjelaskan bahwa Castells mendefinisikan masyarakat jaringan sebagai "struktur sosial berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dijalankan oleh jaringan yang bersumber pada jaringan komputer digital dan mikroelektronik". Dalam kerangka ini, Generasi Z membangun pemahaman politik mereka tidak melalui lokasi fisik tertentu atau institusi formal, melainkan melalui aliran informasi yang bersirkulasi secara bebas melintasi berbagai platform digital. Mereka mengakses diskusi politik melalui Twitter Spaces, menonton analisis kebijakan publik di YouTube, membaca thread argumentatif di Twitter, atau mengonsumsi konten politik singkat namun padat di TikTok. Proses pembelajaran politik ini berlangsung secara non-linear dan multi-sumber, di mana satu isu politik dapat dipelajari melalui berbagai perspektif dan format yang berbeda secara simultan, menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif namun juga berpotensi fragmentatif.

Karakteristik unik lainnya dari literasi politik digital Generasi Z adalah fenomena yang Castells identifikasi sebagai *timeless time* atau waktu tanpa waktu. Dalam konteks politik, konsep ini memanifestasi dalam kemampuan Generasi Z untuk berpartisipasi dalam diskursus politik secara real-time tanpa terikat pada batasan temporal konvensional. Ketika sebuah kebijakan publik diumumkan, respons politik dari Generasi Z dapat muncul dalam hitungan menit melalui berbagai platform media sosial, menciptakan momentum politik yang berlangsung secara cepat dan intens. Mereka tidak perlu menunggu koran pagi atau berita malam untuk mendapatkan informasi dan merespons isu politik, melainkan dapat langsung terlibat dalam pembentukan opini publik pada saat kejadian politik berlangsung. Fenomena ini

menciptakan dinamika politik yang jauh lebih dinamis dan responsif, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal kedalaman refleksi dan analisis kritis terhadap informasi politik yang diterima.

Dimensi ketiga yang sangat signifikan dalam literasi politik Generasi Z adalah praktik *mass self-communication* atau komunikasi massa-diri. Rosit et al. (2024) mengemukakan bahwa berbagai dimensi komunikasi politik digital memerlukan analisis mendalam yang mampu menjelaskan bagaimana dinamika *communication power* atau kekuatan komunikasi mempengaruhi kemampuan Generasi Z dalam mengakses, memproses, dan mendistribusikan informasi politik di media digital. Dalam praktiknya, setiap anggota Generasi Z memiliki potensi untuk menjadi komunikator politik yang dapat menjangkau audiens massa tanpa memerlukan mediasi dari institusi media tradisional atau endorsement dari elite politik. Seorang mahasiswa dapat membuat thread analisis kebijakan di Twitter yang dibaca oleh ribuan orang, seorang aktivis muda dapat membuat video kritik politik di YouTube yang ditonton jutaan kali, atau seorang content creator dapat membuat konten edukatif politik di TikTok yang viral dalam hitungan jam. Demokratisasi kapasitas komunikasi ini mengubah struktur kekuasaan dalam diskursus politik, di mana narasi dominan tidak lagi dapat dikontrol sepenuhnya oleh aktor-aktor politik tradisional.

Namun, di balik potensi transformatif literasi politik digital Generasi Z, terdapat sejumlah tantangan struktural yang mengancam kualitas demokrasi partisipatif. Heryanto et al. (2024) mengidentifikasi bahwa "kompleksitas ruang digital juga membawa risiko penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat mengancam kualitas literasi politik masyarakat". Tantangan pertama yang dihadapi Generasi Z adalah fenomena *information overload* atau banjir informasi yang menciptakan kompleksitas dalam proses kurasi dan verifikasi konten politik. Setiap hari, platform media sosial dipenuhi dengan ribuan bahkan jutaan konten politik yang berasal dari berbagai sumber dengan tingkat kredibilitas yang sangat beragam. Dalam kondisi ini, kemampuan untuk melakukan fact-checking, memverifikasi sumber, membedakan antara opini dengan fakta, serta mengidentifikasi bias dalam penyajian informasi menjadi keterampilan yang sangat krusial namun tidak secara otomatis dimiliki oleh Generasi Z meskipun mereka memiliki literasi digital yang tinggi dalam aspek teknis.

Tantangan kedua yang tidak kalah serius adalah risiko polarisasi politik yang diperkuat oleh mekanisme algoritma platform media sosial. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan *user engagement* cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan riwayat interaksi mereka sebelumnya. Dalam konteks politik, mekanisme ini menciptakan apa yang dikenal sebagai *echo chamber* atau ruang gema, di mana pengguna terutama terekspos pada pandangan politik yang mengkonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada dan jarang terekspos pada perspektif yang berbeda atau bertentangan. Heryanto (2019) menyoroti "berbagai faktor yang mempengaruhi literasi politik, termasuk pendidikan, media, dan partisipasi politik masyarakat, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya

meningkatkan literasi politik di Indonesia". Dalam konteks Generasi Z, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena proses pembentukan literasi politik mereka yang dominan berlangsung dalam ekosistem digital yang rentan terhadap fragmentasi dan polarisasi.

Tantangan ketiga adalah proliferasi disinformasi dan propaganda politik yang menyebar dengan kecepatan eksponensial melalui jaringan digital. Karakteristik informasi di era digital yang bersifat viral, emosional, dan dikemas dalam format yang menarik secara visual membuat konten disinformasi memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan klarifikasi atau fact-checking yang biasanya memerlukan narasi yang lebih kompleks dan kurang menarik secara emosional. Generasi Z yang mengonsumsi informasi politik terutama melalui media sosial sangat rentan terhadap manipulasi informasi, terutama ketika konten disinformasi diproduksi dengan kualitas produksi yang tinggi dan didistribusikan melalui influencer atau akun yang memiliki kredibilitas di mata mereka. Kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi digital tidak secara otomatis memberikan imunitas terhadap disinformasi; diperlukan literasi media yang lebih mendalam yang mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi diproduksi, bagaimana bias dapat terselubung dalam penyajian fakta, dan bagaimana emosi dapat dimanipulasi untuk tujuan politik tertentu.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengembangan literasi politik Generasi Z memerlukan pendekatan multi-dimensi yang melampaui sekadar transfer pengetahuan tentang sistem politik atau keterampilan teknis dalam mengoperasikan platform digital. Diperlukan pengembangan literasi kritis yang mencakup dimensi kognitif, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi politik secara mendalam, mengidentifikasi argumen logis, mendeteksi logical fallacies, dan melakukan sintesis dari berbagai sumber informasi yang berbeda. Dimensi kedua adalah literasi teknis, yaitu keterampilan praktis dalam melakukan verifikasi fakta, mengidentifikasi sumber yang kredibel, memahami bagaimana algoritma membentuk informasi yang mereka terima, dan menggunakan berbagai tools digital untuk fact-checking. Dimensi ketiga adalah literasi etis, yaitu kesadaran tentang tanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi politik, pemahaman tentang dampak potensial dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip komunikasi politik yang etis dan demokratis.

Temuan penting lainnya adalah bahwa terdapat disjungsi antara partisipasi politik digital dengan partisipasi politik konvensional di kalangan Generasi Z. Banyak anggota Generasi Z yang menunjukkan tingkat aktivisme tinggi di ruang digital—aktif berdiskusi tentang isu politik, memproduksi konten politik, atau terlibat dalam kampanye online—namun tidak menunjukkan tingkat partisipasi yang sebanding dalam mekanisme politik formal seperti pemilihan umum, keanggotaan partai politik, atau organisasi kemasyarakatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa energi politik digital tidak secara otomatis terkonversi menjadi partisipasi politik substantif dalam proses demokrasi formal. Diperlukan strategi yang lebih efektif untuk menjembatani

kesenjangan antara aktivisme digital dengan partisipasi politik konvensional, termasuk dengan membuat mekanisme politik formal menjadi lebih accessible, relevan, dan responsif terhadap cara Generasi Z berinteraksi dengan dunia politik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi politik Generasi Z bersifat sangat kontekstual dan issue-driven. Tingkat engagement politik mereka cenderung meningkat secara dramatis ketika berkaitan dengan isu-isu yang mereka persepsikan sebagai relevan dengan kehidupan mereka, seperti kesempatan kerja, biaya pendidikan, kerusakan lingkungan, atau ketidakadilan sosial. Sebaliknya, mereka menunjukkan tingkat engagement yang lebih rendah terhadap isu-isu politik yang dianggap abstrak, teknis, atau jauh dari pengalaman hidup mereka sehari-hari. Pola ini menunjukkan pentingnya mengembangkan strategi komunikasi politik yang mampu menghubungkan isu-isu politik dengan kehidupan konkret Generasi Z, menunjukkan relevansi dan dampak langsung dari kebijakan politik terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melihat signifikansi dari partisipasi politik mereka dalam membentuk kondisi sosial yang mempengaruhi masa depan mereka.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi politik Generasi Z di Indonesia telah mengalami transformasi fundamental dalam era komunikasi politik digital, di mana proses pembentukan pemahaman politik tidak lagi berlangsung melalui jalur-jalur konvensional seperti media massa tradisional atau sosialisasi politik formal, melainkan melalui ekosistem digital yang kompleks dan terjaringan. Heryanto (2024) menegaskan bahwa "literasi politik bukan semata tentang pengetahuan, melainkan juga tentang keterampilan dalam mengakses, mengkomparasikan, dan mengomunikasikan informasi politik kepada orang lain, serta sikap politik warga negara yang lebih otonom dan berlandaskan keajekan nalar". Dalam konteks ini, Generasi Z mengoperasionalkan literasi politik mereka melalui tiga dimensi utama dari Teori Masyarakat Jaringan Manuel Castells, yaitu *space of flows* yang memungkinkan mereka mengakses informasi politik secara bebas melintasi batas geografis, *timeless time* yang memfasilitasi partisipasi politik real-time tanpa hambatan temporal, dan *mass self-communication* yang mendemokratisasikan kapasitas komunikasi politik sehingga setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi politik tanpa memerlukan mediasi institusi tradisional.

Meskipun demikian, potensi transformatif literasi politik digital Generasi Z dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang mengancam kualitas demokrasi partisipatif. Heryanto et al. (2024) mengidentifikasi bahwa "kompleksitas ruang digital juga membawa risiko penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat mengancam kualitas literasi politik masyarakat". Tantangan-tantangan tersebut mencakup fenomena *information overload* yang mempersulit proses kurasi dan verifikasi informasi kredibel, mekanisme algoritma media sosial yang menciptakan

echo chamber dan memperkuat polarisasi politik, serta proliferasi disinformasi yang menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi faktual. Penelitian ini menemukan bahwa literasi digital yang tinggi dalam aspek teknis tidak secara otomatis menghasilkan literasi kritis yang memadai untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi politik secara objektif, menciptakan paradoks di mana Generasi Z memiliki akses informasi yang luas namun rentan terhadap manipulasi informasi.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan literasi politik Generasi Z memerlukan pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan literasi kognitif untuk analisis kritis, literasi teknis untuk verifikasi fakta, dan literasi etis untuk komunikasi politik yang bertanggung jawab. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya strategi untuk menjembatani kesenjangan antara aktivisme digital dengan partisipasi politik konvensional, serta pentingnya mengembangkan komunikasi politik yang mampu menghubungkan isu-isu politik dengan kehidupan konkret Generasi Z agar mereka dapat melihat signifikansi partisipasi politik dalam membentuk masa depan mereka, sehingga potensi demografis dan digital Generasi Z dapat dioptimalkan untuk penguatan kualitas demokrasi Indonesia di era digital.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Arianto, D. (2024). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. [Detail publikasi tidak tersedia dalam dokumen].
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (Edisi 3). Pustaka Pelajar.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Heryanto, G. G. (2019). *Literasi politik: Dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi*. IRCiSoD.
- Heryanto, G. G. (2024). *Membaca lanskap pemilu 2024: Perspektif literasi politik*. Biblosma.
- Heryanto, G. G., et al. (2024). *Ragam persoalan komunikasi politik Indonesia*. IRCiSoD.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (Tjetjep Rohendi Rohidi, Trans.). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ohoiwutun, B. (2020). *Melangkah dengan akal budi, karsa, dan karya*. [Penerbit tidak disebutkan].
- Rosit, M., Rifa'i, A. B., Said, M., Hutagalung, U. H., Shahreza, M., Handayani, S., Anggraeni, D., Aziz, S., Hadibroto, J. U., Soekowati, G. M., Agustina, A.,

- Jazuli, M., & Sudarmanti, R. (2024). *Komunikasi politik digital*. Rajagrafindo Persada.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar metodologi penelitian: Panduan bagi peneliti pemula*. Sibuku.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.